



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI IX DPR RI
(BIDANG KESEHATAN, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BADAN POM, BKKBN, ASKES, JAMSOSTEK DAN BNP2TKI)**

Tahun Sidang	:	2008-2009
Masa Persidangan	:	IV
Rapat ke	:	--
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat
Dengan	:	Kepala Badan POM RI
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari/tanggal	:	Selasa, 5 Mei 2009
Pukul	:	14. ⁰⁰ WIB – selesai
Acara	:	1. Membicarakan hasil Kunjungan Kerja Komisi IX DPR RI pada Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2008-2009; 2. Membicarakan masalah-masalah aktual yang berhubungan dengan bidang tugas Badan POM; 3. Lain-lain.
Ketua Rapat	:	dr. Ribka Tjiptaning/ Ketua Komisi IX DPR-RI
Sekretaris Rapat	:	Dra. Tri Udiartiningrum/ Kabag Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI, Gedung Nusantara I Lantai 1 Jln. Jend. Gatot Subroto, Jakarta Pusat
Jumlah Anggota	:	32 orang anggota dari 50 anggota, 4 orang anggota ijin, orang anggota sakit.

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan POM dibuka pukul 14.30 WIB setelah kuorum terpenuhi sesuai dengan Peraturan Tata Tertib pasal 99 ayat (1), rapat dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Pemaparan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang :

- Masalah-masalah aktual di bidang pengawasan obat dan makanan;
- Hasil pengawasan obat dan makanan yang dilakukan oleh Badan POM;
- Jawaban atas pertanyaan tertulis Komisi IX DPR RI dan lain-lain.

II. POKOK – POKOK PEMBICARAAN

1. Dalam mengatasi beredarnya produk makanan/obat-obatan ilegal, BPOM hendaknya melakukan koordinasi dengan pihak Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). BPOM dapat membuat mapping pada produk-produk yang beredar di masyarakat untuk meminimalisir produk ilegal.
2. Dibutuhkan informasi yang jelas dari BPOM tentang produk-produk makanan dan obat-obatan yang tidak layak dikonsumsi masyarakat. Perlu dilakukan troyosan mengenai izin produksi dan izin edar produk makanan dan obat suatu saat menjadi domain BPOM.
3. Permasalahan produk makanan/ obat-obatan ilegal terus terjadi, karena sanksi hukum yang diberikan tidak membuat efek jera. Untuk itu harus ada langkah-langkah strategis dari BPOM agar kasus tersebut tidak terus terjadi.
4. Sebagian besar iklan-iklan yang disampaikan kepada masyarakat tidak sesuai dengan potensi yang diiklankan dari produk tersebut, seharusnya iklan dapat membuat masyarakat yakin bahwa produk tersebut aman untuk dikonsumsi.
5. Langkah-langkah apa yang ditempuh BPOM dalam mengatasi kasus PT Kimia Farma yang telah mengubah obat kadaluarsa menjadi obat yang masih layak dikonsumsi, padahal obat-obatan tersebut untuk rakyat miskin.
6. BPOM harus mencermati bahwa bahan obat-obatan herbal punya dosis tertentu dan mempunyai batas khasiat ketika di konsumsi masyarakat.

III. KESIMPULAN

1. Dalam kaitan dengan dinamika tantangan globalisasi dan era pasar bebas, Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM untuk dapat meningkatkan kinerjanya dengan profesionalisme yang tinggi dan memiliki sarana maupun prasarana yang lebih memadai dan dukungan dana yang mencukupi.
2. Komisi IX DPR RI mendesak Badan POM untuk berperan aktif menjalin kemitraan strategis dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti YLKI untuk menampung, mencermati dan menindaklanjuti berbagai temuan-temuan berkenaan dengan khasiat, keamanan, mutu dan legalitas obat dan makanan yang beredar di masyarakat.
3. Komisi IX DPR RI meminta BPOM untuk menindaklanjuti berbagai masalah aktual di bidang pengawasan obat dan makanan, khususnya berkenaan dengan peredaran obat palsu, jamu yang dicampur Bahan Kimia Obat (OT-BKO), kosmetika ilegal dan lain sebagainya, serta melakukan pemantauan atas proses penegakan hukum dari inspeksi dan razia terhadap obat dan makanan di Kepolisian, Kejaksaan dan pemeriksaan pengadilan.
4. Komisi IX DPR RI meminta Badan POM untuk menegaskan bahwa obat herbal juga mempunyai dosis tertentu dan mempunyai batasan khasiat ketika dikonsumsi secara luas oleh masyarakat.
5. Komisi IX DPR RI mendukung keputusan Badan POM untuk mencabut izin PBF KF di Surabaya yang melakukan penyimpangan pada tender pengadaan obat di Jawa Timur.

Rapat ditutup pukul 16.00 WIB.

Jakarta, 5 Mei 2009

Pimpinan Komisi IX DPR-RI

Ketua,


dr.RIBKA TJIPTANING